

BAB III : NAHDLATUL ULAMA DAN POLITIK

Aktivitas NU dalam bidang politik diawali dengan masuknya NU dalam MIAI (Al-Majlis Islamil A'laa Indonesia) atau yang lebih dikenal dengan Majelis Tertinggi Islam Indonesia. MIAI sendiri didirikan pada tanggal 15 Rajab 1356 H (21 September 1937 M) di Surabaya, atas prakarsa KH. Wahab Hasbullah (NU) yang ketika itu mengadakan pertemuan yang dimulai pada tanggal 18 September 1937 sampai tanggal pendirian MIAI tersebut dengan KH. Mas Mansyur dan KH. Ahmad Dahlan (Muhammadiyah) serta W. Wondoamiseno (SI).

Pembentukan MIAI ini terutama didorong oleh rasa keprihatinan terhadap situasi dan kondisi pada saat itu, di mana sedang terjadi berbagai pertikaian antara kelompok Islam yang satu dengan kelompok Islam yang lain. Pertikaian juga terjadi di kalangan para pembaru, yakni antara SI dengan Muhammadiyah, dan juga masalah tidak adanya kesamaan pendapat tentang furu' antara SI dan Persis (Persatuan Islam), semakin memperburuk situasi umat Islam pada saat itu.¹⁾

Kondisi umat Islam yang sudah tidak ada kesamaan pendapat ini, ternyata juga dimanfaatkan oleh penjajah. Pemerintah Belanda mengajukan 'Rancangan Undang-undang Pencatatan Perkawinan' yang sebagian besar isinya bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini dimaksudkan agar

1) Deliar Noer, Gerakan Moderen Islam di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1973, hal. 255-256

di antara orang Islam sendiri akan timbul pertikaian, karena adanya persepsi yang berbeda terhadap isi dari undang-undang pencatatan perkawinan yang dibuat tersebut.

Tatapi, apa yang diharapkan Pemerintah Belanda tersebut ternyata tidak terwujud. Adanya undang-undang itu justru semakin mendorong kelompok-kelompok Islam yang ada untuk bersatu dan menyatukan gerak guna melawan pemerintahan kolonial Belanda. Apalagi sebelumnya, NU (dalam hal ini KH. Hasyim Ary'ari) dalam Muktamarnya yang ke-11 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, telah menyerukan adanya persatuan di kalangan umat Islam yang sedang bertikai, untuk bersama-sama menghadapi tantangan dari luar yang mencoba untuk memecah bela umat Islam. Isi seruan tersebut :

'Janganlah kamu jadikan semuanya itu menjadi sebab bercerai berai, berpecah-belah, bertengkar-tengkar dan bermusuhan.... Atau akan kita lanjutkan jugakah perpecahan ini, hina-menghinakan, pecah-memecah, munafik Padahal agama kita hanya satu belaka: Islam! Madzhab kita hanya satu belaka : Syafi'i! Daerah kita satu belaka: Jawa (Indonesia)! Dan kita semuanya adalah Ahlu Sunnah wal Jama'ah belaka!''²⁾

Keterlibatan NU dalam wadah MIAI ini, mempunyai arti yang cukup penting baik bagi MIAI maupun bagi NU sendiri. Bagi NU, keterlibatannya ini merupakan tonggak awal terjunnya ke dalam institusi politik maupun dalam keikutsertannya dalam perjuangan kemerdekaan secara langsung.³⁾ Sebab, selama ini kegiatannya lebih banyak diarahkan atau difokuskan pada kegiatan-kegiatan di bidang

2). Ibid, hal. 262

3). H. Badrud Taman Achda, "Nahdlatul Ulama dan Politik Dewasa Ini, Skripsi, Fakultas Ilmu Politik Universitas Nasional, 1984 hal. 59

diniyah (keagamaan) saja.

Sedang bagi MIAI, kehadiran NU ini mempunyai arti yang cukup penting dalam memainkan peranan dan memajukan wadah ini, baik dalam politik maupun dalam perjuangan bangsa. Ditunjuknya KH. Wachid Hasyim (wakil ketua PBNU) sebagai ketua dewan MIAI dalam rapat pleno yang diselenggarakan di Surabaya pada tanggal 14-15 September 1940, merupakan suatu indikasi bahwa kehadiran NU diharapkan sebagai motor penggerak bagi persatuan umat Islam di Indonesia melalui wadah MIAI ini.

Dewan MIAI yang dipimpin KH. Wachid Hasyim ini bertugas untuk membahas dan memutuskan masalah-masalah yang dianggap penting bagi kemaslahatan ummat dan agama Islam. Di samping itu, KH. Wachid Hasyim juga banyak mengajukan perubahan-perubahan mendasar guna memajukan MIAI di masa-masa mendatang. Akhirnya, usul ini diterima dan dilakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar dan Rumah Tangga serta struktur kepengurusan MIAI.⁴⁾

NU juga berusaha agar MIAI tetap utuh dan tidak terjadi perpecahan di perjalanan. Usaha ini ditunjukkan dengan sikapnya yang keras untuk menolak kehadiran 'Ahmadiyah Lahore' yang ingin menjadi anggota MIAI, karena dikhawatirkan akan menimbulkan perbedaan persepsi politik dan aqidah yang justru pada akhirnya akan menimbulkan perpecahan di dalam tubuh MIAI sendiri. Usaha NU ini

4). Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, Jatayu, Sala, hal. 10

akhirnya mendapatkan persetujuan dari anggota MIAI pada sidang Dewan MIAI September 1940, yaitu tetap menolak kaanggotaan Ahmadiyah Lahore dalam MIAI.

Kehadiran MIAI ini mendapat sambutan yang positif dari kelompok-kelompok Islam yang ada pada saat itu. Maka wajarlah jika yang menjadi anggota MIAI ini semakin banyak, yakni dari tujuh anggota pada tahun 1937, kemudian anggotanya berkembang menjadi 21 anggota pada tahun 1941.

Perjuangan NU tidak hanya terbatas pada masalah upaya penyatuan kelompok-kelompok Islam yang sedang bertikai saja, akan tetapi NU juga ikut melibatkan diri dalam perjuangan bangsa dalam menuntut kemerdekaan. Melalui MIAI, tokoh-tokoh NU tampil bersama GAPPI (Gabungan Partai-Partai Politik Indonesia) yang melahirkan aksi bersama yang disebut Kongres Rakyat Indonesia (KORINDO). Aksi politik ini menuntut 'Indonesia Berparlemen'.

Dalam muktamar NU yang ke-15 di kota kelahirannya yaitu Surabaya, NU semakin mempertegas keterlibatannya dalam perjuangan bangsa. NU mendesak pemerintahan Hindia-Belanda untuk segera memberikan pertolongan terhadap jama'ah haji Indonesia yang sedang menderita di Makkah akibat pecahnya perang antara Jerman dan Belanda. Tuntutan lain yang dilakukan NU antara lain, meminta kepada pemerintah Hindia-Belanda untuk memberikan kebebasan kepada muballigh dan guru agama untuk mengajarkan Islam.⁵⁾

5). Choirul Anam, op. cit. hal. 111

Di samping itu, keputusan paling penting yang diambil pada muktamar tanggal 15-21 Juni 1940 tersebut adalah menyangkut sikap NU terhadap calon pemimpin yang pantas menjadi presiden pertama. Sebab saat itu NU sudah yakin kalau kemerdekaan Indonesia segera terwujud. Tinggal menunggu waktu saja. Maka, saat itu juga NU mengadakan rapat rahasia yang hanya diikuti oleh 11 tokoh saja, yang dipimpin oleh KH. Mahfudz Shiddiq. Dalam rapat itu diketengahkan dua nama yaitu Ir. Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta, dan akhirnya disepakati Ir. Soekarno sebagai calon presiden pertama, sedangkan Drs. Muhammad Hatta kurang mendapat dukungan. ⁶⁾

Pada saat pemerintahan Belanda jatuh, dan kedudukannya diganti Jepang, NU-pun tidak henti-hentinya melakukan perlawanan terhadap penjajah yang baru ini, bahkan tokoh utama NU yaitu Ro'is Akbar KH. M. Hasyim Asy'ari sempat ditahan Jepang selama kurang lebih 5 bulan. Kemudian KH. Mahfudz shiddiq juga ditangkap oleh Jepang. Kedua tokoh NU ini dituduh telah meyebarakan sikap membenci Jepang kepada para ulama dan umat Islam Indonesia. Di samping itu KH. M. Hasyim Asy'ari dan KH. Mahfudz Shodiq juga dituduh telah mengorganisir gerakan anti Jepang. ⁷⁾

Ditangkapnya dua tokoh NU tersebut, telah membakar semangat umat Islam khususnya NU untuk melakukan perlawanan

6). Ibid. hal. 112

7). KH. Syaifuddin Zuhri, Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia, PT Al-Ma'arif, Bandung 1977, hal.632

terhadap Jepang. Apalagi, Jepang telah mewajibkan bangsa Indonesia untuk ikut mendewakan Kaisar Tenno Heika, maka perlawanan umat Islam sudah tidak dapat dihindarkan lagi. Bahkan, NU telah mengeluarkan fatwanya bahwa pendewaan Kaisar (Saikerei) itu merupakan perbuatan menyekutukan Tuhan atau syirik yang harus dijahui oleh setiap muslim. Di samping itu KH. Wahab Hasbullah dan KH. Wachid Hasyim atas nama NU, terus berupaya untuk membebaskan dua tokoh NU yang sedang ditahan Jepang. Akhirnya usaha inipun berhasil, dan kedua tokoh NU yang ditahan tersebut dibebaskan setelah ditahan selama kurang lebih 5 bulan.

Keberhasilan ini, semakin mempertebal kepercayaan diri pada tokoh-tokoh NU akan pentingnya perjuangan untuk mencapai Indonesia merdeka. Usaha-usaha yang tidak kenal berhenti yang dilakukan NU bersama-sama dengan kelompok Islam yang ada ini, akhirnya membuahkan hasil yaitu melunaknya sikap Jepang terhadap umat Islam. Akhirnya Jepang mengambil prakarsa untuk membentuk Kantor Urusan Agama (Shumubu). Sebagai ketua yang pertama adalah Prof. Hussein Djajadiningrat yang tidak lama kemudian digantikan oleh KH. Hasyim Asy'ari.

A. MENJADI PENDUKUNG MASYUMI

Melunaknya sikap dan perlakuan Jepang terhadap bangsa Indonesia terutama golongan agama, sekalipun belum sampai pada tarap pemberian kebebasan bagi organisasi

keagamaan, namun hal itu sudah cukup melegahkan bagi kalangan organisasi keagamaan. Terbukti dari hasil diplomasi yang dilakukan tokoh-tokoh Islam, akhirnya pada bulan Oktober 1942, Jepang mengambil prakarsa untuk membentuk Kantor Urusan Agama (Shumubu).

Bukan hanya itu usaha Jepang untuk mendekati umat Islam yang terus bergerak. Pada tanggal 7 Desember tahun itu juga, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Jepang di Jawa, Seiko Kikikan, mengundang 32 ulama yang ada di Jawa dan Madura termasuk tokoh utama NU, KH. Hasyim Asy'ari, KH. Mahfudz Shoddiq, KH. Wachid Hasyim, dalam sebuah resepsi penghormatan Jepang kepada para Ulama, bertempat di Istana Gubernur di Batavia.⁸⁾

Pertemuan yang belum pernah dilakukan pada zaman penjajah Belanda ini, merupakan suatu pertanda melunaknya sikap Jepang terhadap golongan Islam, dan ini juga berarti Jepang telah mengakui kedudukan dan martabat para Ulama di Indonesia yang memang mempunyai kedudukan istimewa di masyarakat.

Sikap Jepang yang tidak sekeras Belanda ini, membuat NU memilih sikap lunak dan diplomatis dalam menghadapi Jepang, tidak sekeras ketika menghadapi Belanda dulu. Karena sikap NU yang demikian ini, maka Jepang kemudian mengangkat

8). Harry J. Benda, Bulan Sabit Matahari Terbit, terjemahan *The Crescent and The Rising Sun, Indonesia Islam Under The Japanese Occupation : 1942-1945*, Penerjemah Dhaniel Dhakidae, Pustaka Jaya, Jakarta, 1980, hal. 263

KH. Wahid Hasyim bersama beberapa tokoh NU lainnya menjadi anggota Legislatif buatan Jepang.

Kesempatan ini dipergunakan oleh KH. Wahid Hasyim untuk membujuk Jepang agar mau mengizinkan organisasi keagamaan dapat mengaktifkan kembali kegiatannya.⁹⁾

Berkat inisiatif KH. Wahid Hasyim dan tokoh-tokoh dari Muhammadiyah, maka secara resmi sejak September 1943, pemerintah Jepang mengizinkan dan mengakui aktifnya kembali NU dan Muhammadiyah. Izin ini tentu saja merupakan permulaan baru yang amat penting bagi peranan Islam menjelang kemerdekaan.

Pada bulan Oktober 1943, atas prakarsa pimpinan NU dan Muhammadiyah menciptakan organisasi baru sebagai wadah organisasi Islam yang juga sekaligus sebagai pengganti dari MIAI yang bubar pada saat pembentukan organisasi baru ini. Badan federasi baru ini diberi nama "Majelis Syuro Muslimin Indonesia" (Masyumi).¹⁰⁾

Dukungan NU terhadap Masyumi tidak dapat diragukan lagi. KH. Wahid Hasyim yang sudah menjadi anggota legislatif, telah melakukan usaha-usaha dengan gigih agar organisasi keagamaan diberi kebebasan untuk melakukan aktifitasnya, merupakan cikal bakal munculnya ide untuk membuat suatu wadah baru bagi organisasi-organisasi Islam yang ada, di mana organisasi tersebut sesuai dengan

9). Choirul Anam, op. cit. hal. 117

10). Harry J. Benda, (Daniel Dhkidae, Penerjemah), op. cit. hal. 185

perkembangan zaman sekaligus sebagai pengganti MIAI yang dianggap sudah tidak memadai lagi.

Begitu juga KH. Hasyim Asya'ri, tidak dapat begitu saja dilepaskan peranannya dalam Masyumi. Beliau merupakan salah seorang yang membidani kelahiran Masyumi, yang kemudian ditunjuk sebagai ketua. Hanya saja beliau tidak dapat memimpin secara aktif, karena kesibukannya dalam memimpin pondok pesantrennya di Tebuireng, Jombang, maka tugas sehari-harinya sebagai ketua Masyumi ditangani oleh anaknya yang juga salah seorang tokoh NU yang cukup terkemuka yaitu KH. Wahid Hasyim, dibantu oleh tokoh-tokoh Islam lainnya, seperti Ki Bagus Hadikusumo (Muhammadiyah), KH.A. Halim (Persatuan Umat Islam), KH. Ahmad Sanusi (Perhimpunan Umat Islam Indonesia).

Masyumi sendiri diberikan izin oleh pemerintah Jepang untuk berdiri dengan maksud untuk dapat dimanfaatkan demi kepentingan-nya, yaitu membantu penyelesaian perang melawan sekutu. Namun umat Islam cukup tanggap dan waspada terhadap siasat Jepang tersebut, sehingga keadaannya justru berbalik. Jepanglah yang dapat dimanfaatkan oleh Masyumi untuk mencapai tujuannya.¹¹⁾ KH. Wahid Hasyim yang telah ditunjuk oleh Bapakny KH. Hasyim Asy'ari untuk memimpin Masyumi berhasil menghubungi tokoh-tokoh muda yang cukup militan, di antaranya adalah Mohammad Natsir (Persis), Harsono

11). H. Abdul Basit Adnan, Kemelut di Nahdlatul Ulama Antara Kyai dan Politisi, CV. Mayasari, Solo, 1982, hal. 21

Tjokroaminoto (PSII), Prawoto Mangkusasmito dan Zainul Arifin (NU).

Langkah demi langkah yang ditempuh oleh Masyumi, akhirnya berhasil meyakinkan Jepang akan kekuatan yang ada pada Masyumi. Maka, ketika Jepang mulai mengalami kekalahan demi kekalahan dalam perang dengan sekutu, dan satu demi satu daerahnya dikuasai oleh sekutu, Jepang mulai berpikir untuk memanfaatkan Masyumi ini guna membantu dalam melawan sekutu. Kemudian Jepang membentuk badan "Tiga A", yang kemudun namanya berubah menjadi "PUTERA" (Pusat Tenaga Rakyat), yang terakhir berubah lagi namanya menjadi "Jawa Hokokai", di mana Masyumi mendapat kedudukan istimewa sebagai penasehat utama.

Melalui Jawa Hokokai ini, Jepang meminta agar dikumpulkan pemuda-pemuda yang akan dilatih kemiliteran dan dijadikan tentara "PETA" (Pembela Tanah Air). KH. Wahid Hasyim meminta kepada Jepang melalui Abdul Hamid Ono agar melatih para santri menjadi tentara PETA,¹²⁾ yang kemudian namanya bukan PETA, tapi "HIZBULLAH" dan "SABILILLAH". Yang ditunjuk sebagai pimpinan Hizbullah adalah Zainul Arifin (NU), sedangkan tempat kedudukannya di Jakarta. Barisan Sabilillah, sebagai basis kekuatannya berada di kota Malang, sedangkan yang ditunjuk sebagai ketuanya adalah KH. Masykur (Konsul NU Malang).

Atas siasat KH. Wahid Hasyim, tentara yang terdiri

12). Saifuddin Zuhri, Guruku Orang-orang dari Pesantren, PT. Alma'arif, Bandung, 1977, hal. 191-192

dari pemuda-pemuda Indonesia ini, tidak dikirim ke medan perang melawan sekutu di Burma, dengan alasan tidak mempunyai pengalaman dikhawatirkan justru akan merepotkan tentara profesional Jepang. Tetapi KH. Wahid Hasyim meminta agar pertahanan di dalam negeri diserahkan kepada para tentara yang baru dilatih ini. Ternyata usul ini mendapat persetujuan dari pihak Jepang, dengan menjadikan tentara santri ini menjadi tentara cadangan yang tetap di Indonesia.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh umat Islam Indonesia agar secepatnya Indonesia menjadi negara merdeka, mendapat simpati dari kaum muslimin yang tersebar di seluruh dunia. Ketua Kongres Kaum Muslimin seluruh Dunia, Syech Mohammad El Amin El Husaini mendesak Jepang agar memimikirkan nasib umat Islam Indonesia yang kala itu berjumlah sekitar 50.000.000 jiwa, dan mengharap Perdana Menteri Kaiso agar memerdekakan Indonesia, walaupun waktunya masih harus menunggu. Akhirnya Perdana Menteri Kaiso menjanjikan akan kemerdekaan Indonesia.¹³⁾

Mengetahui adanya janji Jepang tersebut, kemudian KH. Hasyim Asy'ari bersama dengan tokoh-tokoh lain yang ada di Masyumi mulai mengumpulkan kekuatannya, baik melalui jalur Masyumi maupun Hizbullah dan Sabilillah.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, apa yang selama ini diidam-idamkan bangsa Indonesia akhirnya terwujud. Indonesia merdeka, yang direbut dari Jepang dengan melalui peperangan

13). Maksoem Machfudz, *Kebangkitan Ulama dan Bangkitnya Ulama, Kesatuan Ummat, Surabaya, 1982, hal. 75-76*

yang cukup banyak meminta korban.

Setelah Indonesia mendapatkan kemerdekaanya, bukan berarti perjuangan Masyumi telah selesai. Pada tanggal 7 Nopember 1945, Masyumi memprakarsai Kongres Umat Islam di Yokyakarta. Dalam kongres tersebut, disetujui perubahan Masyumi dari federasi menjadi satu-satunya Partai Politik Islam di Indonesia, yang diberi amanat untuk memimpin dan melaksanakan seluruh umat Islam di Indonesia.

Setelah Masyumi burubah dari federasi menjadi partai politik, strukturnya dibedakan menjadi dua lembaga, yaitu Majelis Syuro dan Pengurus Besar. KH. Hasyim Asy'ari masih juga dipercaya menjadi Ketua Umum Majelis Syuro. Didudukkannya para Ulama pada Majelis Syuro ini bertugas memberikan bimbingan dan fatwa kepada Pengurus Besar, agar jalannya partai Masyumi sebagai pemegang amanat umat Islam tidak menyimpang dari tuntunan agama. Sebab, dikhawatirkan akan terjadinya penyimpangan dari para pelaku politik di dalam Masyumi ini. Penghalalan segala cara, demi menjalankan politik adalah bertentangan dengan tuntunan agama.¹⁴⁾

Adapun susunan kepengurusan Masyumi secara lengkap adalah sebagai berikut :

A. MAJELIS SYURO (DEWAN PARTAI)

Ketua Umum : KH. Hasyim Asy'ari
 Ketua Muda I : Ki Bagus Hadikusumo
 Ketua Muda II : KH. Wachid Hasyim
 Ketua Muda III : Mr. Kasman Singodimedjo
 Anggota-anggota : KH. R. Muhammad Adnan

14). Ibid. hal. 79

H. Agus Salim
 KH. Wahab Chasbullah
 KH. Abdul Halim
 KH. Sanusi
 Syeich Jamil Jambek

B. PENGURUS BESAR

Ketua : dr. Sukiman
 Ketua Muda I : Abikusno Cokrosuyoso
 Ketua Muda II : Wali Al Fatah
 Sekretaris I : Harsono Cokroaminoto
 Sekretaris II : Pramotpo Mangkusasmito
 Bendahara : Mr. R.A. Kasmat 15)

Melihat susunan dari pengurus Masyumi tersebut, terlihat beberapa tokoh NU yang menjadi pengurus Majelis Syuro, sehingga tampaklah peranan NU sebagai tulang punggung dari Partai Politik Masyumi. Peranan NU lebih kuat lagi, ketika partai Masyumi melakukan sedikit perubahan mengenai struktur organisasinya pada mutamar di Sala pada 10-13 Pebruari 1946.

Dalam muktamar tersebut diputuskan untuk sedikit merubah mengenai struktur organisasi. Perubahan tersebut terjadi pada sektor Pengurus Besar yang tidak lagi menggunakan pola komposisi: ketua dan ketua muda serta beberapa orang pembantu, tetapi berubah menggunakan pola: Dewan Pimpinan Partai yang terbagi menjadi dua bagian: Ketua Bagian Politik dan Pembelaan, dibantu Sekretaris Umum, Dewan Perencana, Dewan Penyidik dan Dewan Penerangan.

Susunan pengurus yang baru, setelah dilakukan beberapa perubahan adalah sebagai berikut :

DEWAN PIMPINAN PARTAI

Ketua	:	Dr. Soekiman
Ketua Bagian Politik	:	Mr. Mohammad Roem
Anggota-anggota	:	Dr. Abu Hanifah Mohammada Natsir Harsono Tjokroaminoto HM. Faried Ma'roef
Ketua Bagian Pembelaan	:	KH. A. Wahid Hasyim
Anggota-anggota	:	KH. Msykur KH. Abdul Wahab Hasbullah KH. Zainul Arifin Mr. Kasman Singodimedjo MH. Mawardi Soelio Adikusumo 16)

Demikianlah, peranan NU yang cukup besar dalam ikut serta membesarkan Masyumi. NU memegang kendali dalam Majelis Syuro, dan ditambah lagi tugasnya setelah adanya muktamar Masyumi di Sala, di mana tokoh-tokoh utama NU dipilih menjadi anggota Dewan Pimpinan Partai, Bagian Pembelaan, sehingga NU juga ikut menentukan arah politik yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Partai (Pengurus Besar).

Kedudukan NU di Masyumi yang sudah demikian kuat ini, maka pada muktamar NU yang ke-16 di Prwakarta pada tanggal 26-29 Maret 1946, mengeluarkan fatwa yang sangat menentukan perkembangan Masyumi, sehingga partai ini menjadi partai terbesar di Indonesia. Isi fatwa tersebut adalah seruan agar semua warga NN yang tersebar di seluruh Indonesia ikut serta mendukung tegaknya Partai Masyumi,¹⁷⁾ maka wajarlah kalau Masyumi kemudian menjadi partai terbesar dan mempunyai anggota yang tersebar di seluruh pelosok tanah

16). Choirul Anam, op. cit. hal 128-129

17). H. Abdul Basit Adnan, op. cit. hal. 17

air Indonesia.

Setelah Masyumi menjadi besar dan merupakan partai Islam satu-satunya di Indonesia, sedikit demi sedikit mulai muncul pertentangan di dalam partai ini. Pertentangan dalam tubuh Masyumi ini muncul tatkala pemerintahan Syarif menciptakan 'Perjanjian Linggarjati' dan pemerintahan Amir Syarifuddin menciptakan 'Perjanjian Renville'.¹⁸⁾ Kedua perjanjian ini, menurut NU sangat tidak menguntungkan bagi kedaulatan Republik Indonesia bahkan sangat membahayakan bagi kesematan negara. Maka NU melalui Masyumi memperlihatkan sikap menentang kedua perjanjian tersebut.

Dari peristiwa tersebut, kemudian muncul dua kelompok dalam tubuh Masyumi. Di satu pihak anti Perjanjian Linggarjati yang diwakili Dr. Soekiman yang mendapat dukungan dari NU, di lain pihak yang setuju terhadap Perjanjian Linggarjati yang diwakili Mohammad Roem, Safruddin Prawironegoro dan Muhammad Natsir.

Bibit perpecahan dalam tubuh Masyumi ini semakin berkembang. Pada saat kabinet dipimpin oleh Amir Syarifuddin, Masyumi menolak untuk duduk dalam kabinet. Namun, sikap ini ternyata mendapat tentangan dari PSII, karena PSII menghendaki dapat jatah kedudukan dalam kabinet ini.¹⁹⁾ Maka keluarlah PSII dari Masyumi, karena merasa sudah tidak sependapat lagi. Keluarnya PSII dari Masyumi ini sudah tentu mengurangi kekompakan Masyumi sebagai partai Islam satu-satunya di Indonesia, sebab sekarang ada partai

18). Choirul Anam, op. cit. hal 129-130

19). H. Abdul Basit Adnan, op. cit. hal. 23

Islam lagi.

Sementara itu dalam tubuh Masyumi sendiri mulai tampak terjadi pergeseran-pergeseran nilai. Para Ulama yang duduk dalam Majelis Syuro yang merupakan dewan tertinggi, mulai ditinggalkan.

Bahkan, sudah mulai menjurus pada dominasi kelompok intelektual pada partai Islam yang mempunyai basis kekuatan umat Islam dan dukungan para Ulama pesantren. Padahal kelompok intelektual ini masuk Masyumi secara perorangan, tetapi justru mereka dapat menduduki posisi yang cukup penting dan menentukan dalam kepemimpinan partai. Keadaan ini tentu saja sangat merugikan bagi kelompok Islam seperti NU, Muhammadiyah dan lain-lain, yang menjadi anggota Masyumi bersama dengan kelompoknya.

Setelah kejadian-kejadian di tubuh Partai Masyumi tersebut, partai Masyumi mengalami kegoyahan baik kekompakan, keutuhan maupun keberadaannya di tengah-tengah percaturan politik di Indonesia. Perbedaan kepentingan dan keinginan setiap kelompok nampak mulai mewarnai keadaan Masyumi. Padahal di masa-masa awalnya Masyumi merupakan organisasi Islam yang patut dibanggakan karena besarnya rasa persatuan dan kebersamaan dengan melupakan perbedaan dan kepentingan kelompok.

B. MENJADI PARTAI NAHDLATUL ULAMA

Perselisihan dan pertentangan di dalam tubuh Partai Masyumi semakin bertambah buruk, apalagi setelah adanya

keputusan tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga melalui muktamarnya yang ke-4 di Yogyakarta pada tanggal 15-19 Desember 1949.

Majelis Syuro yang selama ini merupakan dewan tertinggi dalam struktur organisasi Masyumi, setelah muktamar tersebut dirubah menjadi Dewan Penasehat Partai. Kalau dulu Majelis Syuro punya hak untuk mencegah atau melarang Dewan Pimpinan Partai (Pengurus Besar), kalau tindakannya dianggap melanggar atau menyimpang dari tuntunan agama. Tetapi dengan adanya perubahan tersebut, dengan sendirinya kewenangan Majelis Syuro menjadi hilang.

Perubahan fungsi dan wewenang dari Majelis Syuro tersebut dilakukan karena selama ini Majelis Syuro ini dianggap telah menghalangi dan mengurangi kebebasan dari Dewan Pimpinan Partai dalam melakukan tindakan yang bersifat pilitis. Majelis Syuro dianggap sangat menghambat kecepatan bertindak, sebab semua masalah dan persoalan baik masalah politik maupun non-politik harus diketahui oleh Majelis ini. Begitu juga terhadap tindakan yang akan diambil. Tindakan tersebut harus mendapatkan ijin dari Majelis Syuro.

Karena selama ini tindakannya merasa terhambat dengan adanya Majelis Syuro yang merupakan Dewan Tertinggi dalam partai, maka para intelektual Masyumi berusaha merubaha kedudukannya. Akhirnya melalui muktamarnya di Yogyakarta tersebut, usaha ini berhasil. Majelis Syuro dirubah menjadi Dewan Penasehat Partai, dengan demikian kewenangan yang selama ini dimiliki oleh Majelis Syuro, sekarang hilang.

Bibit keretakan yang timbul dalam Masyumi ini, dicoba oleh NU untuk dinetralisir dengan mengusulkan agar Masyumi dirombak kembali menjadi semacam federasi yang dapat menampung aspirasi semua kelompok Islam yang ada,²⁰⁾ seperti pada saat pembentukan MIAI dan Masyumi dahulu. Tetapi sayang, usul ini tidak mendapat tanggapan dari tokoh-tokoh utama Partai Masyumi.

Usaha-usaha untuk menyingkirkan peranan para Ulama dalam Masyumi yang dilakukan oleh kelompok intelektual yang 'berpendidikan barat' ini terus dilakukan. Sebab, menurut pikiran mereka (para intelektual), para Ulama sangatlah tidak pantas untuk ikut bermain-main dalam percaturan politik. Tugasnya para Ulama adalah di masjid-masjid, di surau-surau dan di pondok-pondok pesanteren, bukannya ikut aktif dalam lembaga-lembaga politik seperti Masyumi ini.

Usaha kelompok intelektual yang 'westernised' untuk menyingkirkan para Ulama dari dalam tubuh Masyumi ini, lebih menyakitkan lagi ketika mereka menyindir dengan mengatakan, 'Jabatan Kementerian Agama adalah kedudukan yang 100% bersifat politik. Yang seharusnya menjabat menteri agama adalah orang-orang intelektual, dan --bukannya seorang Ulama atau Kyai--. Bahkan menteri agama dapat juga dipegang oleh orang-orang yang tidak beragama Islam, asalkan dapat menjamin terpeliharanya fereedm of religion.' 21)

Usaha merubah kedudukan Majelis Syuro dari Dewan Tertinggi menjadi Dewan Penasehat Partai yang dilakukan

20). H. B.T. Achda, op. cit. hal 72

21). Chalid Mawardi, *Practica Politica Nahdlatul Ulama - Mendayung di Tengah Gelombang*, Yayasan Pendidikan 'Prektika', Jakarta - Surabaya, 1967, hal. 21

kelompok intelektual Masyumi lewat muktamarnya di Yogyakarta, sudah tentu menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pimpinan NU.

NU yang didukung oleh para Ulama, sangat kecewa dengan adanya perubahan tersebut, sebab bagaimanapun para Ulama merupakan kelompok yang paling berjasa dalam pendirian Masyumi. Sangatlah tidak pantas jika setelah Masyumi menjadi partai yang besar, kemudian menyingkirkan peranan para Ulama dari dalam Masyumi.

Besarnya Masyumi selama ini sebenarnya karena adanya dukungan dari para Ulama Pesanteren yang mempunyai pengikut cukup banyak. Jika kemudian NU melakukan koreksi atas keadaan ini sangatlah wajar, mengingat peran yang selama ini telah dimainkan oleh para Ulama guna membesarkan Masyumi sangatlah besar. Apalagi dalam struktur organisasi NU, Ulama mempunyai kedudukan yang istimewa.

Koreksi dari NU ini ternyata tidak mendapat tanggapan dari kalangan Intelektual Masyumi, hal ini mengakibatkan timbulnya pertentangan antara NU dan Masyumi, sehingga hubungan keduanya menjadi semakin renggang. Tetapi, karena didorong oleh rasa perlunya persatuan diantara kelompok-kelompok Islam yang ada di Indonesia, maka NU tetap terus berusaha untuk mencoba dan berusaha agar masalah ini dapat diselesaikan dengan musyawarah. Namun usaha inipun tidak ditanggapi, bahkan Masyumi berusaha mendinginkan masalah ini.

Karena NU merasa usahanya tidak mendapatkan tanggapan yang sungguh-sungguh dari Masyumi, maka pada muktamarnya

yang ke-18 di Jakarta pada tanggal 30 April - 3 Mei 1950, NU memutuskan untuk keluar dari Masyumi, namun pelaksanaan keputusan tersebut masih ditangguhkan untuk sementara waktu sambil memberi kesempatan Masyumi untuk meninjau kembali pendiriannya setelah NU melakukan koreksi.²²⁾

Reaksi Masyumi ternyata diluar dugaan NU. Masyumi yang merasa sudah cukup kuat dan besar, ternyata tidak mengindahkan sama sekali, justru kalangan Masyumi tetap menganggap sepele akan ancaman NU tersebut jika dibandingkan kebesaran Masyumi. Bahkan, tokoh-tokoh politik Masyumi semakin menunjukkan sikap-sikap politiknya yang menurut pandangan Ulama-ulama NU kurang tepat.

Ketika Achmad Subarjo, salah seorang tokoh Masyumi yang terpilih menjadi Menteri Luar Negeri pada waktu Kabinet Sukiman berkuasa, menandatangani Persetujuan Keamanan Bersama dengan pihak Amerika atau yang lebih dikenal dengan MSA (Mutual Security Act.). NU tidak setuju dengan persetujuan yang telah dibuat oleh Achmad Subarjo sebagai Menteri Luar Negeri dengan pihak Amerika tersebut. Sebab, dengan persetujuan tersebut, berarti politik luar negeri yang dilakukan Achmad Subarjo sudah menyimpang dari politik luar negeri yang sudah digariskan yaitu bebas dan aktif, karena sudah pro-Amerika.

Kejengkelan NU terhadap Masyumi semakin bertambah, ketika Kabinet Natsir berkuasa. Moh. Natsir yang menjadi

22). Choirul Anam, op. cit. hal. 133.

Perdana Menteri mengeluarkan seruan kepada gerombolan DI/TII Kartosuwiryo agar turun dari gunung-gunung dan keluar dari hutan-hutan, untuk menyerah dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, keamanan mereka dijamin dan akan diberi pengampunan. Ternyata janji Natsir ini tidak terwujud. Ketika gerombolan DI/TII yang dipimpin oleh Amir Fattach memenuhi seruan pemerintah untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi dan memasuki kota, ternyata mereka dilucuti dan dimasukkan ke dalam penjara.²³⁾ Belum lagi tindakan pemerintahan Sukiman yang tidak berusaha mencegah terjadinya pertumpahan dara di Jawa Tengah yang terkenal dengan 'Peristiwa Batalyon 426', sehingga banyak pemuda-pemuda Islam yang korban, ditangkap dan dijebloskan ke penjara.

Kekecewaan demi kekecewan yang dialami NU atas tindakan para Intelektual Masyumi, dan usaha-usaha untuk mengadakan pendekatan kembali ternyata tidak segera membuahkan hasil, karena memang tidak mendapatkan perhatian dari Masyumi. Maka setelah beberapa waktu lamanya dan NU sudah merasa pesimis akan hasil usaha pendekatan yang dilakukan, maka KH. Abdul Wahid Hasyim selaku Ketua Muda PBNU, berusaha mencari jalan untuk penyelamatan, kalau mungkin berusaha untuk seluruh umat, paling tidak berusaha untuk NU sendiri.

Ketidakpuasan pimpinan NU terhadap kebijaksanaan Masyumi yang dimulai sejak tahun 1949 yaitu setelah muktamar

23). Chalid Mawardi, loc. cit. hal. 26-27

Masyumi yang ke-4 di Yogyakarta, akhirnya sampai pada puncaknya ketika tuntutan NU atas Menteri Agama dalam Kabinet Wilopo tidak dipenuhi. Tentang masalah yang satu ini, menurut KH. Saifuddin Zuhri kepada Slamet Effendy Yusuf, ''Masalah Menteri Agama cuma picu peledak dari ketidakpuasan akibat kebijaksanaan-kebijaksanaan Partai. Keliru kalau orang hanya melihat itu sebagai masalah pokoknya. Soalnya bisa dipahami dengan pertanyaan, cukup pantas-kah suatu kekuatan besar seperti NU, secara terus-menerus dikurangi perannya, lalu satu-satunya yang masih dimiliki diambil lagi''. 24)

Pada tanggal 26 April sampai 1 Mei 1952 dalam muktamarnya yang ke-19 di Palembang, NU secara resmi memutuskan untuk keluar dari Partai Masyumi, setelah sebelumnya didahului konferensi NU se-Jawa dan Madura yang diadakan di rumah KH. Maksoem Cholil, di desa Jagalan, Jombang.

Dalam konferensi di Jombang ini, setelah melalui pembahasan secara mendalam, akhirnya konferensi mengambil keputusan agar PBNU menarik diri dari Partai Masyumi. Keputusan di Jombang ini, dimasukkan dalam agenda muktamar di Palembang, kemudian keputusan di Jombang ini diperkuat dengan keputusan PBNU dalam mukatamar yang ke-19, dengan 61 suara setuju, 9 suara tidak setuju, dan 7 suara blanko. Keputusan tersebut terkenal dengan ''Keputusan PBNU tanggal 5/6 April 1952''.

Dalam muktamar di Palembang tersebut, ada yang cukup menarik disaat-saat NU mengambil keputusan untuk keluar dari

24). Slamet Effendy Yusuf dkk, *Dinamika Kaum Santri*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983, hal. 42

Masyumi, dan menyatakan diri sebagai partai politik yang berdiri sendiri. Yang menarik dalam muktamar tersebut adalah hadirnya Ketua Umum Masyumi dr. Sukiman berada dalam medan muktamar, ketika keputusan tersebut diambil.

Keputusan untuk keluar dari Masyumi yang diambil dalam muktamar tersebut, sekaligus memberi petunjuk akan pelaksanaan dari keputusan tersebut. Petunjuk pelaksanaan yang diamanatkan muktamar adalah sebagai berikut 25) :

1. Pelaksanaan dari keputusan tersebut agar jangan sampai menimbulkan kegoncangan di kalangan umat Islam Indonesia.
2. Pelaksanaan dari keputusan tersebut dilakukan dengan perundingan terlebih dahulu dengan Masyumi.
3. Keputusan ini dijalankan dalam hubungan yang lebih luas yang berkenaan adanya keinginan untuk membentuk dewan pimpinan umat Islam yang nilainya lebih tinggi, dimana partai-partai dan organisasi-organisasi Islam baik yang sudah maupun yang belum tergabung dalam Masyumi dapat berkumpul dan berjuang bersama-sama.

Keputusan NU untuk memasuki babak baru sebagai partai politik yang berdiri sendiri ini, bukan tanpa ada kesulitan sama sekali. Berbagai persoalan dan masalah baru muncul, baik yang berasal dari dalam Partai NU sendiri, maupun adanya tekanan-tekanan yang berasal dari luar organisasi. Kesulitan-kesulitan yang muncul ini merupakan suatu ujian bagi Partai NU yang baru berdiri agar tetap dapat bertahan hidup.

Kesulitan yang ditimbulkan dari dalam tubuh NU sendiri

25). Slamet Effendy Yusuf dkk, hal. 42-43. Baca juga Syarief Muhammad, Saham NU Dalam Perubahan Sosial di Indonesia, Skripsi Fak. Adab IAIN Yogyakarta, 1978, hal. 41

diantaranya yang pertama adalah masih adanya beberapa tokoh Ulama dan tokoh-tokoh pemuda 'ANSOR' yang masih belum paham akan masalah kenapa NU keluar dari Masyumi, ditambah lagi adanya propaganda dari Masyumi yang menganggap NU sebagai pemecah belah 'uchuwah islamiyah'. Sehingga para tokoh Ulama dan tokoh-tokoh muda ini tidak setuju kalau NU memisahkan diri dari Masyumi. Sykurlah masalah ini dapat diatasi melalui penjelasan-penjelasan yang sabar dan tekun. Pimpinan NU juga memberi kebebasan kepada warganya yang masih ingin tetap di Masyumi, dipersilahkan untuk tetap di Masyumi dengan niat yang baik. Dan yang ingin bergabung dengan NU kembali, dipersilahkan untuk bergabung dan bahu-membahu menegakkan bendera-bendera NU.²⁶⁾

Anjuran untuk bergabung dan bahu-membahu menegakkan bendera-bendera NU, mendapat tanggapan dari delapan orang anggota fraksi Masyumi secara suka rela membentuk 'Fraksi NU' dalam Parlemen NU. Kedelapan orang yang membentuk fraksi NU di parlemen tersebut adalah 'KH. Wahab Hasbullah, KH. Muhammad Ilyas, Muhammad Saleh Suryoningprojo, Muhammad Ali Prataningkusumo, A.A. Achsien, Idham Chalid, A.S. Bachmid, dan Zainul Arifin,²⁷⁾ yang kemudian digantikan oleh KH. Saifuddin Zuhri.'

Kesulitan kedua yang muncul adalah kurangnya tenaga trampil di bidang politik. NU tidak mempunyai tenaga-tenaga ahli di bidang pemerintahan dalam negeri, perburuhan, hubungan internasional, kemiliteran dan pertahanan, pertanian, dan lain sebagainya.

26). Chalid Mawardi, op. cit. hal. 30

27). Saifuddin Zuhri, op. cit. hal. 643

Untuk mengatasi masalah ini, NU melakukan rekrutment terhadap tokoh-tokoh muda, diantaranya adalah Djameluddin Malik, Medan, yang juga pemilik studio film Persari yang terlokasi di Polonia, Jatinegara. Beliau kemudian menjadi tokoh NU yang cukup terkenal, karena kemampuannya yang memang cukup berbobot, baik dibidang politik maupun kemampuannya dalam menghimpun massa. Atas prakarsa beliau jugalah lahirnya 'LESBUMI' (Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia),²⁸⁾ sebuah lembaga seni dan budaya yang didirikan untuk mencegah berkembangnya seni dan kebudayaan komunis.

Selain itu, tokoh muda yang berhasil direkrut NU adalah Idham Chalid, tokoh muda putra Kalimantan yang memulai keterlibatannya di NU lewat ANSOR. Ia seorang tokoh muda lulusan pondok modern Gontor yang punya militansi tinggi, enak bicarannya, ahli dalam bidang taktik dan strategi, mampu berbicara tiga bahasa asing, Arab, Inggris dan Jepang. Karena kemampuan yang dia miliki ini, maka kariernya di NU cepat menanjak. Bahkan pada muktamar NU yang ke-21 di Medan, Idham dipilih sebagai Ketua Umum PBNU.

Kesulitan NU selanjutnya setelah menjelma menjadi partai politik yang berdiri sendiri adalah kesulitan menghadapi lawan-lawan politiknya seperti PKI dan sekutu-sekutunya, disamping juga harus menghadapi tekanan dari Masyumi.

28). Maksoem Machfoedz, op. cit. hal. 160

Tekanan Masyumi terhadap NU ini dapat disimak dari ucapan Yusuf Wibisono, salah seorang anggota DPP Masyumi.

'Kalau NU memegang peranan dalam politik, maka itu berarti politik jatuh ke tangan kaum 'orthodok', dan hal itu sangat berbahaya.' 29) Bahkan, ada yang lebih kasar dari Yusuf Wibisono dalam menyerang tokoh-tokoh NU. KH. Abdul Wahab Hasbullah, tokoh utama NU pada waktu itu, tidak lepas dari serangan propaganda Masyumi. Beliau diserang dengan ucapan yang cukup kasar. 'Kalau kepalanya KH. Abdul Wahab Hasbullah dicukur dengan beling (pecahan kaca), dan kemudian dikucur (diguyur) dengan air jeruk, maka akan keluarlah dari kepala Pak Wahab itu 'palu dan arit'.' 30)

Untuk menghadapi serangan propaganda Masyumi ini, NU melakukan serangan balik. NU membuka kontra kampanye 'anti kaum intelektual' yang tidak mengerti hukum agama Islam dan tidak pernah menjalankan kewajiban-kewajiban agama Islam, tetapi dapat menjadi pemimpin Masyumi.

Dalam menghadapi pertentangan ideologis dengan PKI ini, NU mencoba kembali menawarkan kepada partai-partai Islam untuk membuat badan federasi sebagaimana yang pernah NU tawarkan kepada Masyumi, sebelum NU keluar dari Masyumi. Usaha NU ini sekali lagi tidak mendapatkan perhatian dari Masyumi, sekalipun pada saat itu sedang Masyumi sedang menghadapi tekanan berat dari lawan-lawan politiknya seperti PKI dan PNI. Namun, usul NU ini ternyata mendapat tanggapan positif dari dua partai Islam lainnya, yaitu PSII dan PERTI.

Setelah mengadakan rapat persiapan pada tanggal 28

29). Chalid Mawardi, op. cit. hal. 30

30). Ibid. hal. 31

Agustus 1952, akhirnya badan federasi yang diusulkan NU ini terbentuk lewat pertemuan yang diadakan di Gedung Parlemen Republik Indonesia pada tanggal 30 Agustus 1952 yang diikuti oleh ketiga pucuk pimpinan partai Islam tersebut. Nama badan federasi yang baru dibentuk tersebut adalah "Liga Muslimin Indonesia" dengan anggota-anggota yang terdiri dari NU, PERTI, PSII, dan Daroed Dakwah wal Irsyad.³¹⁾ Penandatanganan dilakukan oleh KH. Wahid Hasyim (NU), H. Siradjuddin (PERTI) dan Abikoeso Tjokrosoejoso (PSII). Salah satu tujuan dari badan ini adalah mencapai masyarakat Islamiyah yang sesuai dengan hukum-hukum Allah swt dan Sunnah Rasulullah saw.

Setelah Partai NU selesai mempersiapkan dirinya untuk terjun ke arena politik, maka dimulailah perhatian NU diarahkan ke soal pemilihan umum. Para pemuka Islam sadar perlunya penjelasan kepada umat Islam akan pentingnya masalah pemilu, sebab hasil pemilu akan menentukan wakilnya di parlemen. Maka pada tanggal 11-15 April 1953, para pemuka Islam mengadakan muktamar Alim Ulama se-Indonesia, bertempat di Medan. Keputusan yang diambil dalam muktamar tersebut adalah mewajibkan umat Islam untuk ikut mengambil bagian dalam pemilu baik untuk anggota DPR maupun Kostituante.³²⁾

Beberapa keputusan penting yang diambil NU setelah menjadi partai yang juga sekaligus merupakan taktik NU untuk menyelamatkan eksistensi partai. Keputusan untuk duduk dalam

31). Maksoem Machfoedz, op. cit. hal. 99

32). Choirul Anam, op. cit. hal. 200

Kabinet Ali Sastroamidjojo ke-1 misalnya. Keputusan ini semakin memperkuat posisinya dalam percaturan politik, di samping juga mulai dapat menyisihkan peranan Masyumi. Terbukti dalam kabinet ini yang semula merupakan koalisi PNI-Masyumi menjadi koalisi PNI-NU.³³⁾

Jabatan yang diduduki NU pada Kabinet Ali ke-1 ini adalah Wakil Perdana Menteri yang dijabat oleh Zainul Arifin, KH. Masykur sebagai Menteri Agama, Muhammad Hanafiah sebagai Menteri Agraria, dan Sunaryo S.H. sebagai Menteri Dalam Negeri.

NU juga berusaha mempercepat dilaksanakannya pemilihan umum, sebab jumlah perwakilan NU yang ada di parlemen terlalu sedikit. Menteri Dalam Negeri, Sunaryo, akhirnya ditunjuk Parlemen Sementara untk membuat Rancangan Undang-undang Pemilu, dan kalau mungkin sekaligus melaksanakan pemilu. Sekalipun Kabinet Ali ke-1 ini jatuh, akan tetapi, RUU Pemilu sudah disahkan dan Sunaryo sudah berhasil mengeluarkan anggaran belanja untuk pemilu.³⁴⁾

Setelah jatuhnya Kabinet Ali ke-1, dibentuklah kabinet baru dipimpin oleh Burhanuddin Harahap yang merupakan koalisi antara Masyumi-PSI-NU. NU ikut duduk didalam kabinet ini dimaksudkan untuk menjaga agar pemilihan umum dapat dilaksanakan tepat pada waktunya.

Sebelum menghadapi pemilu yang akan dilangsungkan pada tanggal 29 Septenber 1955 untuk memilih anggota DPR dan

33). Ibid. hal. 201

34). Chalid Mawardi, loc. cit. hal. 31

tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Kostituante, maka pada tanggal 8-13 September 1954, NU mengadakan muktamar ke-20 di Surabaya. Muktamar yang pertama sejak NU menjadi partai politik ini, di samping membahas masalah-masalah agama, tetapi juga konsolidasi organisasi untuk menghadapi pemilu mendatang.

Upaya yang dilakukan NU ini tidak lain karena menginginkan kemenangan dalam pemilu nanti. Idham Chalid selaku juru bicara Partai NU memprotes keras upaya PKI menggunakan tanda gambar 'Palu Arit' dengan tambahan kalimat "PKI dan orang-orang tak berpartai". 35) Protes Idham Chalid ini akhirnya dapat menggagalkan upaya PKI tersebut, sekalipun DN. Aidit, ketua CC PKI pernah membujuk Idham agar mau menerima rencana PKI tersebut.

Dalam pemilihan umum yang pertama sejak Indonesia merdeka, ternyata hasil yang dicapai NU di luar dugaan lawan politiknya. NU berhasil masuk dalam kelompok empat besar. Hasil selengkapnya pemilihan umum adalah sebagai berikut :

Hasil Pemilu 1955

Nama Partai	Jumlah suara yang didapat	Prosentase	Jumlah kusi di parlemen
1. PNI	8.434.653	22,3	57
2. Masyumi	7.903.886	20,9	57
3. NU	6.955.141	18,4	45
4. PKI	6.176.914	16,4	39
5. Lain-lain	8.314.705	22,0	59

Sumber : Mahrus Irsyam, "ULAMA DAN PARTAI POLITIK - Upaya Mengatasi Krisis", Yayasan Perkhidmatan, Jakarta, 1984, hal.33

35). Choirul Anam, op. cit. hal. 201

Keberhasilan NU dalam pemilu pertama ini cukup menaikkan prestise dan posisi politiknya, di mana pada waktu masih bersama Masyumi hal ini tak pernah diraih oleh NU. Wakil NU di parlemen, hanya diberi jatah 8 orang saja oleh Masyumi, tetapi setelah NU menjadi partai sendiri dan ikut pemilihan umum, ternyata hasilnya melebihi dari jatah yang selama ini diberikan Masyumi.

Wakil NU di parlemen yang dulu cuma 8 orang wakil saja yang diberikan Masyumi, sekarang menjadi 45 orang wakil di parlemen. Di dalam kabinet, NU juga ikut memegang peranan. Kabinet Ali Sastroamidjojo II yang merupakan koalisi dari PNI-Masyumi-NU, NU menempati 5 jabatan menteri.

Kelima orang NU yang menjadi menteri tersebut adalah KH. Idham Chalid sebagai Wakil Perdana Menteri, Mr. Sunaryo sebagai Menteri Dalam Negeri, Mr. Burhanuddin sebagai Menteri Perekonomian, KH. A. Fattah Yasin sebagai menteri Sosial, dan KH. Muhammad Ilyas sebagai Menteri Agama.³⁶⁾

Kabinet Ali ke-2 ini mendapat tantangan berat dari Presiden Soekarno, di samping timbul kesulitan-kesulitan lain di bidang politik, ekonomi maupun militer. Presiden Soekarno meminta agar PKI yang termasuk empat besar dalam pemilu 1955 diikutsertakan dalam kabinet, namun hal ini ditolak. Karena, PNI-Masyumi-NU memang tidak menginginkan keterlibatan PKI dalam Kabinet. Bukan hanya itu saja desakan Presiden Soekarno, beliau juga mengecam sistem "Demokrasi

36). Saifuddin Zuhri, op. cit. hal.643

Liberal" dianggapnya sudah tidak cocok lagi digunakan di Indonesia. Presiden Soekarno juga mulai melibatkan diri di parlemen sebagaimana 'Demokrasi Terpimpin'.³⁷⁾

Kecaman Presiden Soekarno tersebut juga mendapat dukungan dari masyarakat luas, termasuk juga pimpinan militer. Bahkan, pimpinan militer meminta kepada Presiden untuk membubarkan Parlemen.

Sementara itu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pusat, sudah tidak ada lagi. Apalagi setelah ditangkapnya Menteri Luar Negeri Ruslan Abdulgani, karena terdapat bukti-bukti kuat kalau dia terlibat dalam kandal 'korupsi' dengan dua orang yang berkebangsaan China, yaitu 'Lie Hok Thai dan Piet de Queljoe'. Peristiwa ini terkenal dengan sebutan ''Peristiwa 13 Agustus''.³⁸⁾

Kesulitan yang dialami Kabinet Ali ke-2 di bidang ekonomi, terutama disebabkan karena kesalahan kebijaksanaan yang dilakukan oleh Menteri Perkonomian sebelumnya, jaminan emas yang terus merosot, penyelundupan dan korupsi merajalela dimana-mana, dan hilangnya kepercayaan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, menyebabkan beberapa daerah mengadakan hubungan sendiri dengan luar negeri, tanpa melalui pemerintah pusat.

Yang lebih parah lagi, kabinet ini harus menghadapi oknum-oknum militer, yang ikut melakukan kegiatan politik.

37). Choirul Anam, op. cit. hal. 202-203

38). Chalid Mawardi, op. cit. hal.32

Seperti yang ditulis Chalid Mawardi dalam "Practica Politica", sekelompok perwira Angkatan Darat yang dipimpin Kolonel Zulkifli Lubis, berusaha mengadakan perebutan kekuasaan, tapi usaha ini dapat digagalkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Mayjen. A.H. Nasution.

Tidak hanya aksi yang dipimpin oleh Kol. Zulkifli Lubis saja yang terjadi, aksi kekerasan juga terjadi di daerah Padang. Dewan Banteng yang dibentuk dari anggota divisi Banteng, telah memaksa Ruslan, Gubernur Sumatera Tengah untuk menyerahkan kekuasaan kepada Letkol. Ahmad Husin. Kemudian memproklamkan berdirinya "Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)."

Di Sumatera Kol. Simbolon membentuk Dewan Gajah yang menyatakan memisahkan diri dari pusat dan berdiri sendiri. Di Makassar, Piagam Perjuangan Semesta (Permesta) dipimpin Kol. V. Samuel juga menyatakan yang sama.

Di saat-saat koalisi PNI-Masyumi-Nu atau koalisi Islam dan Nasionalisme sedang menghadapi berbagai kesulitan yang bertubi-tubi ini, Masyumi menarik diri dari Kabinet Koalisi Ali II dan memihak pada PRRI-Permesta.

NU sendiri pada saat timbulnya berbagai kekacauan dan pemberontakan di daerah-daerah, mengumandangkan 'Kerjasama Islam Nasional',³⁹⁾ guna menetralsir keadaan. NU tidak mau mengikuti jejak Masyumi yang menarik diri dari koalisi di kabinet, sebab hal itu tentu akan semakin menambah buruknya

39). Ibid. hal. 34

suasana. Di samping itu, ketika PBNU sedang mengadakan pembicaraan dengan Presiden Soekarno, PBNU manganjurkan pemerintah agar membuat 'Dewan Nasional' sebagai tempat untuk berkonsultasinya tokoh-tokoh dan pimpinan masyarakat. Dengan begitu, akan dapat mengurangi bahkan mencegah timbulnya konflik diantara para tokoh-tokoh pimpinan masyarakat.

Keluarnya Masyumi dari koalisi ini, akan sangat menguntungkan kan PKI yang di pemilu pertama 1955 masuk dalam kelompok empat besar, karena PKI sudah sejak lama mangincar kedudukan di kabinet, apalagi Persiden Soekarno meminta agar PKI dilibatkan dalam kabinet. Akhirnya kabinet Ali II ini menyerahkan mandatnya kembali kepada Presiden pada tanggal 14 Maret 1957.

Masyumi sendiri yang keluar dari koalisi, akhirnya oleh pemerintah dibubarkan pada tahun 1960, karena tuduhan beberapa tokohnya terlibat dalam peristiwa PRRI/Permesta ysg menentang dan menghambat revolusi.⁴⁰⁾

Sementara di daerah-daerah telah terjadi pergolakan, dalam tubuh NU sendiri mulai tampak ada pergeseran nilai. Hal ini terlihat dari muktamar NU yang ke-21, Desember 1956, di Medan. Pembahasan masalah diniyah tidak lagi menjadi pembahasan utama. Perhatian peserta muktamar lebih tertuju pada masalah politik, apalagi pada saat itu di Konstituante sedang terjadi perdebatan masalah penentuan dasar negara.

40). Masduki Baidlawi, Mengapa Masyumi Bubar, Aula no.6 Juli 1986, hal. 54

Perdebatan di dalam Konstituante dalam memilih dasar negara diantara tiga dasar negara yang diusulkan, Dasar Islam, Dasar Pancasila dan Dasar Sosial Ekonomi, mengalami kemacetan. NU sendiri sebagai partai Islam, tentu saja memilih Dasar Islam sebagai dasar negara.

Maksud NU untuk memilih dasar Islam bukan berarti NU anti terhadap Pancasila, menurut NU Islam lebih luas dari Pancasila. KH. Syukri Al-Ghozali, wakil ketua Fraksi NU di Konstituante menjelaskan, bahwa "Islam mencakup kelima sila yang ada dalam Pancasila". Islam dan Pancasila bukan berlawanan satu sama lain.

Setelah terjadi kemacetan dalam pengambilan keputusan di Konstituante, akhirnya dicapai kata sepakat untuk kembali ke UUD 1945, dan NU memberikan saran agar Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dijadikan pembukaan UUD '45.⁴⁰⁾ Kemudian kesepakatan tersebut dikuatkan dengan 'Dekrit Presiden 5 Juli 1959'.

Pergeseran nilai dalam NU yang lain adalah masalah Ketua Umum Tanfidziyah yang dalam NU sekarang mempunyai peranan yang sangat dominan dibandingkan dengan Syuriyyah. Kriteria calon Ketua Umum harus mempunyai ketrampilan dalam bidang politik maupun strategi merupakan kriteria baru dalam pemilihan calon Ketua Umum NU, di samping juga harus alim dan pandai dalam ilmu agama.

Kriteria ini memang sangat berbeda dengan kriteria

40). Chalid Mawardi, op. cit. hal. 35

calon Ketua Umum NU ketika masih merupakan Jam'iyah Diniyah, di mana seorang ketua hanya merupakan alat saja untuk melaksanakan program. Untuk itu seorang calon yang dipilih adalah orang yang mempunyai kecakapan dalam menjalankan program dan mempunyai loyalitas tinggi kepada Syuriah.

Namun, pada muktamar di Medan kriteria yang dipertimbangkan bagi seorang ketua adalah harus mempunyai kedalaman ilmu agama, kedalaman berpikir dan mampu menciptakan strategi dalam permainan politik.

Idham Chalid yang saat itu sebagai Wakil Perdana Menteri merupakan profil yang cocok dengan kriteria sebagai Ketua Umum, akhirnya memang dia yang terpilih sebagai Ketua Umum NU.

Terpilihnya Idham Chalid sebagai Ketua Umum merupakan suatu bukti kalau NU menginginkan peran nyata dalam percaturan politik. Sebab Idham Chalid adalah seorang strategi dalam bidang politik.

Selanjutnya, peran nyata yang dimainkan NU dalam usaha mempertahankan negara dari ancaman PKI, mulai dari gerakan pemuda ANSOR yang sangat berperan dalam usaha menumpas PKI sampai aksi pengganyangan PKI, yang kemudian terkenal dengan "Komando Aksi Pengganyangan - Gestapu" (KAP - GESTAPU) yang dipimpin oleh H.M. Subchan ZE.

Perlawanan NU terhadap PKI bukan hanya yang dipimpin oleh HM. Subchan ZE saja, tetapi di daerah-daerahpun juga melakukan hal yang sama guna menumpas PKI.

Peranan NU bukan hanya dalam usaha menumpas PKI saja

yang patut dicatat dalam sejarah, peranan NU yang lain yang dapat dirasakan manfaatnya sampai sekarang, seperti yang ditulis oleh Choirul Anam,⁴¹⁾ diantaranya adalah :

1. Panitia Haji Indonesia (PHI), merupakan hasil rintisan NU yang beberapa kali menduduki Menteri Agama.
2. Masjid Istiqlal yang merupakan simbol kemegahan Islam di Indonesia, merupakan hasil usaha Menteri Agama KH. Abdul Wahid Hasyim, yang pelaksanaannya dilakukan oleh KH. Muhammad Ilyas yang juga salah seorang tokoh NU.
3. Pendirian IAIN (Institut Agama Islam Negeri), merupakan hasil usaha Menteri Agama KH. Wahib Wahab.
4. Penerjemahan dan pencetakan Al-Qur'an oleh Departemen Agama, merupakan rintisan dari Menteri Agama KH. Saifuddin Zuhri.
5. Musabaqah Tilawatil Qur'an, merupakan rintisan Menteri Agama KH. M. Dachlan.

Puncak dari peran serta NU sebagai partai politik dalam percaturan politik di Indonesia adalah dalam pemilu 1971. Adapun hasil selengkapnya pemilu 1971 adalah :

HASIL PEMILU 1971

NAMA PARTAI	KURSI DI PARLEMEN
1. Golongan Karya	236 kursi
2. Nahdlatul Ulama	58 kursi
3. Parmusi	24 kursi
4. P.N.I.	20 kursi
5. P.S.I.I.	10 kursi
6. Parkindo	7 kursi
7. Partai Katholik	3 kursi
8. Perti	2 kursi
9. Partai Murba	- kursi
10. IPKI	- kursi

Sumber : Maksoem Machfoed, "Kebangkitan Ulama dan Bangkitnya Ulama, Yayasan Kesatuan Ummat, Surabaya, 1982, hal. 226

41). Choirul Anam, op. cit. hal. 229

Perolehan suara dalam Pemilu 1971 ini, merupakan hasil puncak yang dicapai partai NU selama berkecimpunga dalam dunia politik. Sebab setelah Pemilu tersebut pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan mengenai perombakan struktur politik, di mana partai-partai yang menjadi peserta Pemilu 1971, yang berjumlah 9 partai politik dan 1 Golongan Karya, dirubah menjadi 2 partai politik dan 1 Golongan Karya.

C. BERFUSI DENGAN PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Nasib NU sebagai partai politik harus segera berakhir, ketika pemerintah Orde Baru (ORBA) mengeluarkan kebijaksanaan tentang penyederhanaan partai politik. Jumlah partai politik yang menjadi peserta pemilu tahun 1971 adalah 9 partai politik dan 1 Golongan Karya.

Kesembilan partai politik yang menjadi peserta pemilu 1971 adalah NU, Parmusi, PNI, PSII, Parkindo, Partai Khatolik, Perti, Partai Murba dan IPKI, ditambah satu lagi yaitu Golongan Karya (GOLKAR).

Perombakan struktur politik Indonesia dengan melakukan penyederhanaan jumlah partai ini dimaksudkan agar dapat menciptakan dan menjaga stabilitas politik. Sistem banyak partai yang selama ini berlaku, ternyata tidak mampu menciptakan stabilitas nasional. Justru dengan banyaknya jumlah partai politik, telah melahirkan berbagai pertentangan dan pertikaian di antara partai politik yang ada, yang tentu saja sangat mengganggu baik stabilitas nasional maupun

pembangunan.

Perbedaan kepentingan maupun dasar ideologi masing-masing partai politik, serta tidak adanya kesatuan pandangan di antara partai-partai politik tersebut, telah menyebabkan timbulnya kelompok-kelompok dalam masyarakat. Hal ini, tentu saja kurang menguntungkan pemerintah yang sedang melaksanakan pembangunan.

Keadaan yang tidak menguntungkan ini, ditambah lagi adanya persaingan tidak sehat di antara partai-partai tersebut. Sehingga, permusuhan dan saling merongrong untuk menjatuhkan kabinet yang sedang berkuasa, tidak dapat dihindarkan lagi. Akibatnya, setiap kabinet yang dibentuk tidak sempat lagi melaksanakan pembangunan, karena kabinetnya keburu jatuh. Hal inilah yang menyebabkan pemerintah pada waktu itu (baca : ORLA) tidak begitu berhasil dalam melaksanakan pembangunan yang seharusnya dilakukan oleh negara --yang masih berusia muda-- baru merdeka.

Menyadari ketidakberhasilan pemerintah Orde Lama dalam melaksanakan pembangunan karena tidak ditunjang oleh stabilitas nasional yang mantap, maka pemerintah yang baru (baca : pemerintah Orde Baru) mencari alternatif pemecahan yang paling tepat untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah yang cukup rumit ini, agar tercipta satu kesatuan pandangan dan stabilitas nasional yang mantap dapat terwujud. Sehingga, pembangunan nasional dapat dilaksanakan, tanpa ada gangguan yang cukup berarti.

Alternatif yang dianggap paling tepat untuk menciptakan stabilitas nasional yang cukup mantap adalah melakukan perombakan struktur politik dengan menyederhanakan jumlah partai politik yang ada.

Usaha penyedernaan jumlah partai-partai politik ini, telah dilakukan pemerintah Orba yaitu dengan membubarkan partai-partai politik yang menjadi peserta Pemilu 1955 yang sekarang dianggap sudah tidak memenuhi syarat dan tidak cocok lagi sebagai partai politik di Indonesia. Usaha ini tampaknya berhasil, sehingga pada pemilu pertama pada masa pemerintahan Orba, pesertanya hanya 9 partai politik dan 1 Golongan Karya. Jumlah ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah partai politik yang menjadi peserta pada pemilu pertama sejak Indonesia merdeka yaitu pada tahun 1955.

Jumlah partai politik yang menjadi peserta Pemilu 1971 itu ternyata masih dianggap terlalu banyak oleh pemerintah. Maka, sebelum Pemilu 1971 itu dilaksanakan, pemerintah sudah memulai usaha-usaha untuk lebih menyederhanakan lagi jumlah partai politik yang ada.

Usaha pemerintah ini dimulai di awal tahun 1970-an, dengan melakukan lobby tingkat tinggi secara efektif. Lobby ini dimaksudkan untuk membicarakan masalah perombakan struktur politik yang dianggap cukup rumit.

Langkah berikutnya yang ditempuh pemerintah untuk memecahkan masalah ini adalah dengan melakukan pengelompokan partai-partai yang ada menjadi dua kelompok besar yaitu

kelompok "Material-Spiritual" dan kelompok "Spiritual-Material". 42)

Kelompok Material Spiritual adalah kelompok yang menekankan pembangunan materi, tetapi tanpa mengabaikan aspek spiritual. Kelompok ini terdiri dari PNI, Partai Murba, IPKI, Partai Khatolik dan Parkindo.

Sedangkan kelompok kedua, Spiritual Material, adalah kelompok yang menekankan pembangunan spiritual, namun tidak mengabaikan aspek material. Kelompok ini terdiri dari NU, Parmusi, PSII dan Perti.

Dari hasil lobi yang dilakukan pemerintah, akhirnya dicapai kesepakatan untuk membentuk "Kelompok Demokrasi Indonesia" pada tanggal 4 Maret 1970, sebagai realisasi dari kelompok material spiritual. Kelompok ini pada akhirnya menjadi "Partai Demokrasi Indonesia"

Sembilan hari setelah pembentukan kelompok demokrasi Indonesia, tepatnya pada tanggal 13 Maret tahun itu juga, kelompok kedua yakni kelompok Spiritual-Material, akhirnya mencapai kesepakatan setelah dilakukan pembicaraan secara intensif untuk membentuk "Kelompok Persatuan Pembangunan" sebagai realisasi dari rencana pemerintah tersebut.

NU sebagai partai politik yang menduduki urutan kedua dalam pemilu 1971, tidak dapat berbuat apa-apa terhadap rencana tersebut, kecuali menerima dengan hati ter-

42). Slamet Effendy Yusuf, dkk, op. cit. hal. 56 Baca juga Ali Murtopo, "Strategi Politik Nasional" Yayasan Proklamasi, CSIS, Jakarta, 1974, hal. 75

buka demi kepentingan nasional. Bahkan, ide pengelompokan tersebut dianggap positif dan ada manfaatnya untuk memudahkan dalam proses pengambilan keputusan, karena perbedaan pendapat dalam masyarakat dapat diperkecil. 43)

Kelompok Persatuan Pembangunan, yang terdiri dari Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Serikat Islam Indonesia dan Partai Islam Perti, pada tanggal 5 Januari 1973 mengeluarkan "Pernyataan Penggabungan"

Adapun mengenai nama yang dipilih untuk 'fusi' keempat partai Islam tersebut, setelah terlebih dahulu dilakukan pembicaraan yang berjalan cukup sengit, akhirnya dicapai kesepakatan untuk memilih nama yang sesuai dengan nama kelompok yang dibentuk pada tanggal 13 Maret 1970, yaitu "Partai Persatuan Pembangunan" sebagai nama dari fusi keempat partai Islam tersebut.

Pernyataan penggabungan tersebut, kemudian diperkuat lagi dengan "Piagam Pembentukan", yang dikeluarkan pada tanggal 13 Februari 1973. 44) Setelah resmi fusi keempat partai tersebut bentuknya menjadi partai, pemerintah kemudian mengeluarkan UU Nomer 3 tahun 1975, tentang penetapan berlakunya hasil penyederhanaan jumlah partai politik di Indonesia dengan hanya 2 partai politik yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) serta 1 Golongan Karya (GOLKAR).

Peranan NU sendiri dalam membidani lahirnya PPP cukup

43). Ibid.

44). AD dan ART Partai Persatuan Pembangunan.

besar, mulai penentuan tanda gambar, struktur organisasi sampai pada peranan tokoh NU dalam kepengurusan PPP.

Penentuan tanda gambar "KA'BAH" untuk PPP merupakan usulan dari NU. NU sendiri mendapatkan gambar Ka'bah dari Rois 'Aam Pengurus Besar Syuriah NU, yaitu KH. Bisri Syamsuri ketika dalam suatu rapat PBNU, ia mengusulkan agar tanda gambar Ka'bah dipakai sebagai lambang partai yang baru dibentuk itu. 45)

Di dalam pembentukan struktur organisasi PPP, banyak dipengaruhi oleh agama dan modernisasi serta pengaruh unsur yang membentuknya. Pengaruh unsur yang membentuknya yang paling kuat, menurut Facry Ali dan Iqbal A. Saimima adalah unsur NU yang paling kuat jika dibandingkan dengan unsur yang lain. 46) Struktur organisasi PPP (lihat gambar 1) dapat kita bandingkan dengan struktur organisasi NU (lihat gambar 2).

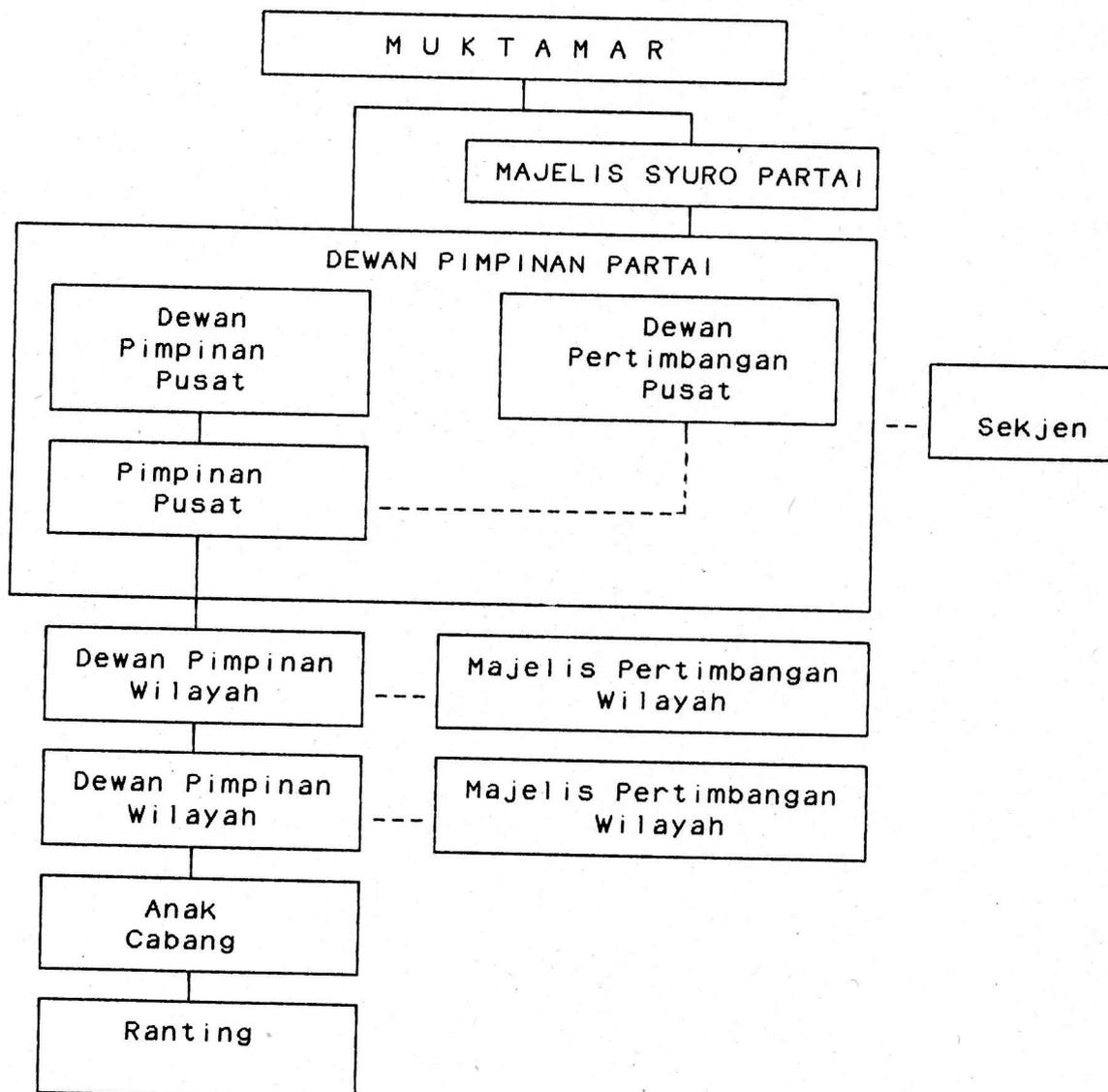
Dalam struktur organisasi PPP terdiri dari Majelis Syuro dan Dewan Pimpinan Partai. Struktur organisasi yang demikian ini, --tidak jauh berbeda-- bahkan sama dengan struktur organisasi yang ada di NU, hanya berbeda namanya saja. Kalau di NU ada Dewan Syuriah (kalau di PPP namanya Majelis Syuro) dan Dewan Tanfidziyah (kalau di PPP namanya Dewan Pimpinan Partai).

Begitu juga dengan kemunculan pimpinan dalam PPP secara

45). Slamet Effendy Yusuf, dkk, op. cit. hal. 58

46). Facry Ali dan Iqbal A. Saimima, "Analisa Kekuatan Politik di Indonesia, Seri Prisma, LP3ES, 1985 hal. 239

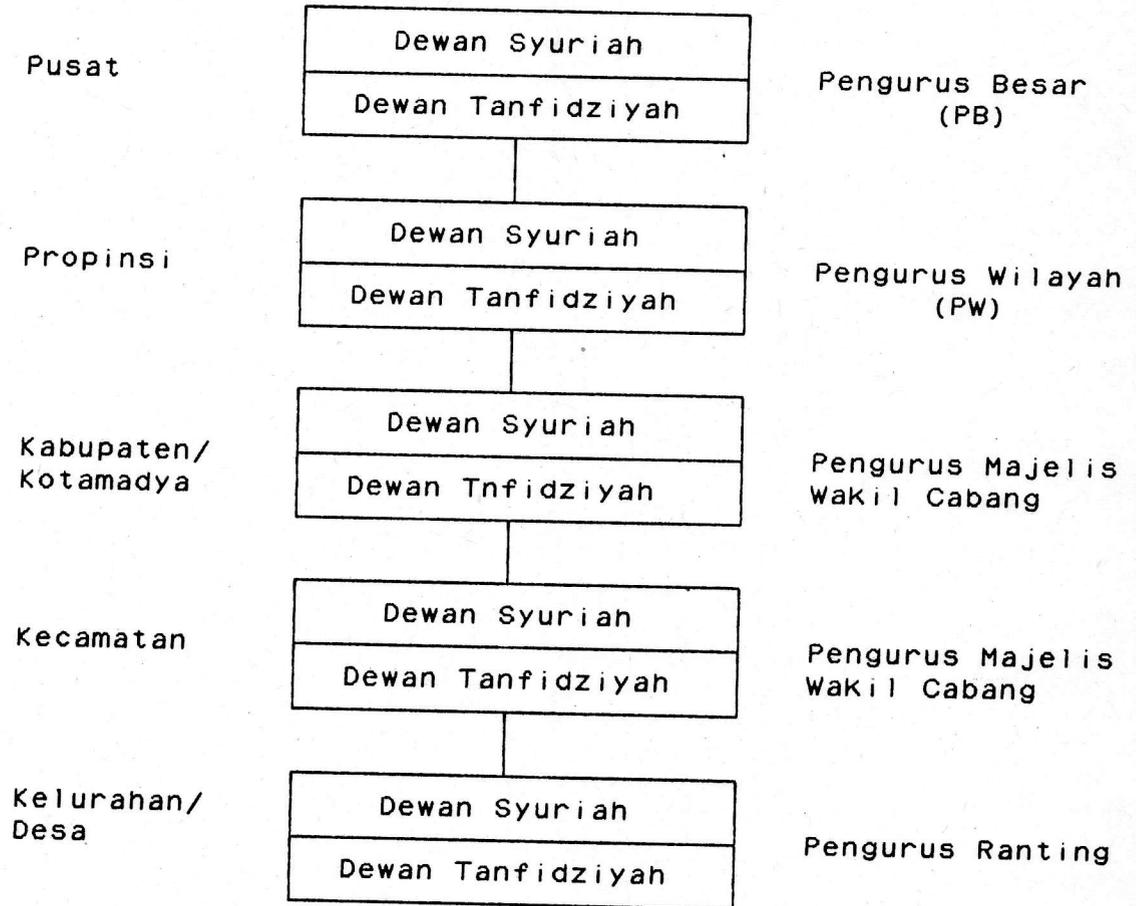
Gambar 1. STRUKTUR ORGANISASI PPP



KETERANGAN : — Hubungan line (hirarkhis langsung)
 ---- Hubungan tidak langsung (konsultatif)

formal diproses lewat susunan kekuasaan. Pimpinan pusat misalnya, pimpinan yang ada di pusat ini direkrut dari muktamar, sedangkan untuk pimpinan yang ada di wilayah maupun di cabang direkrut dari konferensi. Rekrut pimpinan seperti ini sama persis dengan NU dalam melakukan pemilihan pimpinan.

Gambar 2. STRUKTUR ORGANISASI NU



SUMBER : Facyr Ali dan Iqbal A. Saimima, "Analisa Kekuatan Politik di Indonesia," Seri Prisma, LP3ES, 1985, hal. 240 - 241

Seperti yang diungkapkan sebelumnya, Dewan Pimpinan Partai di PPP sama dengan Dewan Tanfidziyah kalau di NU. Rekrut pimpinan pusat di NU dilakukan melalui muktamar, sedang pimpinan yang ada di wilayah maupun di cabang, di rekrut lewat konferensi wilayah dan cabang. Dengan demikian proses rekrutmen pimpinan di PPP tidak berbeda dengan yang dilakukan NU dalam proses pemilihan pimpinan.

Peranan NU dalam PPP terlihat jelas dari susunan pengurusnya. Majelis Syuro yang berwenang dan berkewajiban

memelihara kehidupan dan tindakan-tindakan Partai di pusat maupun di daerah-daerah agar berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam, Rois 'Aam dan wakilnya dipegang oleh tokoh utama NU yaitu KH. Bisri Syamsuri dan KH. M. Dachlan. Fatwa dan pertimbangan yang berdasarkan agama dari majelis ini sifatnya mengikat Partai.

Majelis Pertimbangan Pusat yang berkewajiban memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Pimpinan Pusat mengenai tugas sehari-hari, ketua umumnya dipegang oleh KH. Masykur. Majelis ini juga bertugas untuk mengawasi jalannya kepemimpinan partai agar tidak menyimpang dari kaidah-kaidah agama. Apabila terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan kepemimpinan partai, majelis ini dapat meminta diadakan sidang pleno Dewan Pimpinan Partai, untuk meminta pertanggungjawaban.

Jabatan penting lain yang dipegang oleh NU adalah sebagai Presiden Partai yang dijabat oleh Dr. KH. Idham Chalid yang juga ketua umum PBNU.

Dengan banyaknya jabatan penting yang dipegang oleh NU ini, secara langsung NU ikut menentukan jalannya partai, di samping juga mempunyai tugas untuk mengawasi jalannya partai secara langsung.

Dipegangnya beberapa posisi penting oleh NU ini, tampak disadari benar oleh unsur-unsur PPP yang lain. Hal ini tidak lepas dari hasil yang telah ditunjukkan NU dalam pemilu 1971, di mana NU mendapatkan kurasi yang lebih besar dari ketiga partai politik yang berfusi dalam PPP. NU

mendapatkan 58 kursi, Parmusi 24 kursi, PSII 10 kursi dan Perti cuma 2 kursi. Di sini terlihat jelas kemampuan NU, hasil yang dicapai masih lebih besar walaupun ketiga unsur PPP yang lain digabungkan.

Menyadari akan hasil yang dicapai pada pemilu tersebut, membuat ketiga unsur PPP tersebut tidak begitu mempermasalahkan kedudukan NU --setidaknya pada masa-masa awal pendirian PPP ini-- hingga timbul Konsensus 1975.

Dalam pemilu 1977 yang merupakan pemilu pertama bagi PPP, ternyata mampu menduduki urutan kedua dari tiga peserta pemilu, sekalipun jumlahnya tidak seimbang dengan hasil yang dicapai Golkar yang menduduki urutan pertama. Golkar memperoleh 232 kursi, PPP memperoleh 99, sedangkan PDI mendapatkan 29 kursi.

Hasil yang diperoleh PPP tersebut, kemudian didistribusikan kepada keempat unsur yang ada di PPP, sesuai dengan Konsensus 1975 yakni didasarkan pada hasil pemilu 1971. Pendistribusiannya adalah NU mendapat 56 kursi, MI 24 kursi, PSII 14 kursi dan Perti mendapat 5 kursi. 47)

Dengan hasil distribusi seperti itu, maka kedudukan NU masih merupakan unsur yang terbesar dalam fusi di PPP, dibandingkan dengan unsur PPP yang lain.

Namun di balik keberhasilan NU dalam berfusi di PPP tersebut, ternyata membawa NU ke sudut perpecahan di antara para pimpinan NU sendiri. Sebab, setelah beberapa tokoh utama

47). Maksoem Machfoed, op. cit, hal. 247

NU sibuk mengurus masalah politik di PPP, ladang utama NU yang mestinya digarap yakni urusan pembinaan umat dan masalah-masalah yang menyangkut soal agama menjadi terbengkelai. Perhatian pimpinan NU lebih manguutamakan urusan politik daripada urusan yang menyangkut urusan umat. Sehingga kemudian muncul pro-kontra terhadap keterlibatan NU di politik praktis.

Apalagi sebelum Pemilu 1982, MI menuntut perimbangan kursi dengan distribusi NU 49 kursi, MI 30 kursi, SI 15 kursi dan Perti 5 kursi. Tuntutan MI ini pada akhirnya membawa kericuhan dalam tubuh PPP yang akhirnya membawa perpecahan di antara unsur-unsur yang berfusi dalam PPP.